



Aset Daerah Bermasalah Cenderung Menurun

SAMBAS- Sekretaris Daerah Sambas H Iamiat Akadot mengatakan Opini LKPD TA 2011, 2012 dan 2011 menunjukkan trend menurun dari sisi permasalahan. "Tahun 2011 ada 5 catatan BPK, di tahun 2012 menurun menjadi hanya dua catatan, dan tahun 2013 sisa satu catatan dari BPK dan itu soal asset,"

inisiatif BPK RI juga ikut memfasilitasi penuntasan masalah. "Ada yang sudah selesai, dan lainnya masih proses," katanya.

Munculnya persoalan aset ini merupakan dampak dari perubahan sejak mulai ditunjuknya Sambas menjadi otonomi percontohan tahun 1996 dan dampak

dari pemekaran. "Karena

sewaktu dua hal itu terjadi dan pemerintahan ter-

bentuk meski bisa berjalan sesuai aturan, persoalan

lainnya menyusul. Lalu ke-

tika pemerintahan daerah

berjalan selanjutnya baru

muncul persoalan asset ini,"

katanya.

Bahkan selama ini, tam-bah Sekda, sudah dilaku-kan upaya-upaya, seperti mengundang pihak Pemkab Bengkayang dan Pemkot Singkawang untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini termasuk provinsi. Per-soalan ini sisa satu catatan bahkan di tahun 2011 atas

Sambas untuk penyerahan asset. Bahkan dewan sendiri akan menurunkan tim untuk memverifikasi data dan dilakukan penyel-ian lapangan. Masalah ini jika tak ada halangan akan segera dituntaskan. "In sya Allah sebelum berakhir ja-batan saya, sudah tuntas," katanya. (*Har*)

proses. Karena kita tak mengatahui apa-apa. Seperti soal alas hak atas asset yang ada, nah persoalan-persoalan inilah yang se-dang dibenahi" jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sambas H Masud Sulaiman mengatakan Bu-pati Sambas sudah me-minita persetujuan DPRD

pemekaran terjadi, ada sekolah dasar ditengani cabang dinas provinsi, se-dangkan SMP dan SMA di-tangani Kandep Pendidikan (Kendekbud, red). Begitu otonomi semuanya diser-ahkan ke Pemkab masing-masing.

"Setelah itu kesulitan mengaturanya dan butuh